BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Presiden dalam menetapkan Perppu, sebagai amanah dari UUD NRI Tahun 1945 harus berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 itu sendiri sebagai landasan fundamental negara. Dalam menetapkan Perppu, Presiden juga memfungsikan lembaga-lembaga lainnya seperti halnya DPR sebagai pengawal atas Perppu yang ditetapkan, sesuai dengan paham konstitusionalisme yang memuat esensi pembatasan kekuasaan dan kekuasaan itu sendiri dibatasi oleh konstitusi sebagai norma hukum tertinggi, dimana persoalan yang dianggap terpenting dalam paham konstitusional adalah pengaturan mengenai pengawasan atau pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan dengan mengemban *the limited state*, agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan tidak sewenang-wenang dan hal dimaksud dinyatakan serta diatur secara tegas dalam pasal-pasal konstitusi. Adapun batasan materi muatan Perppu yang belakangan dituangkan dalam Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 138/PUU- VII/2009 mesti dituangkan dalam peraturan yang legalitasnya lebih kuat dibandingkan putusan pengadilan semata, sehingga dapat dijadikan acuan dalam menerbitkan Perppu oleh Presiden. Sekalipun atas dasar subjektifitas Presiden dalam bingkai hal ihwal kegentingan yang memaksa, batasan materi muatan Perppu perlu dilegalkan agar tidak lagi menimbulkan polemik di masyarakat, tidak

menciderai hak-hak konstitusional dan tetap sejalan dengan konsep negara yang berdasarkan pada konstitusi *rule of law*.

2. Kewenangan yang dimiliki oleh presiden dalam menetapkan Perpu merupakan kewenangan atribusi karena diamanatkan oleh UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Oleh sebab itu, tindakan Presiden dalam penerbitan Perppu berada dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan untuk mengambil tindakan cepat dalam urusan legislasi. Dengan perkataan lain, wewenang Presiden menetapkan Perppu adalah wewenang luar biasa di bidang perundang-undangan harus berhati-hati dan memperhatikan dengan seksama pembentukan
3. terhadap waktu terkait pemberlakuan Perppu di Indonesia setelah diterbitkan oleh Presiden perlu memiliki interval waktu yang jelas. Sehingga, masa kegentingan yang memaksa tidak larut begitu lama hingga tiadanya kepastian hukum dalam menentukan suatu kebijakan, sebab salah satu dari tujuan hukum adalah adanya kepastian hukum *dogmatic recht*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Diterbitkannya peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai acuan teknis dalam

penerbitan Perppu oleh Presiden, terutama membatasi ketentuan hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai bingkai ketentuan Perppu itu sendiri, materi muatan dalam Perppu perlu disebutkan secara tersirat dalam peraturan pelaksana tersebut agar tidak menimbulkan ambiguitas di masyarakat.

2. Terkait hal ihwal kegentingan yang memaksa dimana Presiden berkewajiban dalam menerbitkan Perppu apabila terjadinya keadaan mendesak dimana kedudukannya sebagai kepala pemerintahan untuk mengambil tindakan cepat dalam urusan legislasi seharusnya ada pengaturan lebih jelas mengingat pembentukan Perppu dalam kondisi Negara sedang dalam keadaan darurat dan seharusnya ada batasan-batasan apa saja yang bisa dan tidak bisa presiden lakukan dalam menerbitkan Perppu agar muatan dalam Perppu tidak syarat akan kepentingan.
3. Pengaturan terkait batasan waktu pemberlakuan Perppu juga harus menjadi perhatian bersama, ketentuan tersebut sebaiknya diakomodir dalam peraturan yang terlegitimasi secara hukum. Berkaca dari beberapa negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial yang sebagian memuat secara tegas tentang pengaturan waktu pemberlakuan Perppu. Sehingga Perppu tidak syarat akan penyalahgunaan oleh penguasa, dan tidak dijadikan sebagai alat politik untuk memperlancar suatu kepentingan elit politik.